

Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah pada Pelaksanaan Harga Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Tingkat Petani Swadaya di Kebun Lingkup Unit Marihat

Arifah Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : nasutionarifah6@gmail.com

ABSTRACT

. The current problem is the frequent occurrence over-supply of fresh fruit bunches of palm oil owned by smallholders that exceed the demand from palm oil processing factories. The purpose of this research is to analyze the realization price of FFB sales at the collecting level, the realization of export sales prices of Crude Palm Oil (CPO), realization of kernel sales prices and government policies on the realization of FFB sales prices at smallholder and the Government policy in the future to increase the bargaining power of farmer of FFB in West Sumatra. Two data sources used are primary and secondary data. Primary data is obtained directly from independent smallholders and other stakeholders, the instruments that researchers use are direct interviews, questionnaires, field observations and focus group discussions. Secondary data used is time series data using the Error Correction Model (ECM) analysis method. The results show that the variable realization price of FFB sales at the Gatherer level, the realization price of export and local CPO sales, the realization of export and local kernel sales prices proved to have a significant effect on the price realization of FFB sales at independent farmers but government policies related to FFB pricing have not significantly affected prices sales realization at the level of independent smallholders. Through the process of monitoring and evaluation of policies that have been established before and determine the right strategy in the future, is one way that can be done by the government to improve the bargaining power farmer of FFB in Unit Marihat

Keywords: error correction model, goverment regulation, palm oil, farmer

ABSTRAK

Kelapa sawit merupakan produk tanaman unggulan dan memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto unit Marihat. Permasalahannya saat ini adalah sering terjadi kelebihan pasokan tandan buah segar (TBS) milik produsen kecil mandiri, sehingga melebihi permintaan dari pabrik pengolahan kelapa sawit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis harga jual aktual TBS di tingkat pengepul, harga jual aktual ekspor minyak sawit mentah (CPO), harga jual aktual TBS dan kebijakan pemerintah terhadap harga jual aktual TBS pada tingkat petani swadaya serta kebijakan pemerintah di masa depan untuk meningkatkan daya tawar petani. Dua sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari pekebun swadaya dan pemangku kepentingan lainnya. Alat yang digunakan peneliti adalah wawancara tatap muka, kuesioner, observasi lapangan dan focus group. Data sekunder yang digunakan adalah data time series dengan menggunakan analisis error Correction Model (ECM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel harga jual TBS di tingkat pengepul, harga jual ekspor dan CPO lokal, harga jual ekspor dan kernel lokal diduga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga jual aktual TBS pada pekebun mandiri. di tingkat nasional, namun kebijakan pemerintah mengenai harga buah dan sayur segar tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penjualan di tingkat petani mandiri. Melalui proses pemantauan dan evaluasi kebijakan yang ada saat ini serta penentuan strategi yang tepat ke depan, hal ini merupakan salah satu cara pemerintah dapat meningkatkan daya tawar produsen kelapa sawit mandiri kecil yang tergabung dalam unit Marihat.

Keywords : error correction model, kebijakan pemerintah, TBS, petani swadaya

PENDAHULUAN

Subsektor hortikultura yang mempunyai potensi besar untuk tumbuh di unit Marihat salah satunya adalah kelapa sawit. Evaluasi luas tanam dan hasil tanaman unit Marihat tahun 2022, kelapa sawit menduduki peringkat pertama dibandingkan tanaman lain seperti karet dan kakao. Kelapa sawit memiliki rata-rata luas tanam dan hasil terbesar dengan total luas tanam 384.237,68 Ha dan total produksi 1.184.692,79 ton yang tersebar di sebagian besar unit Marihat.

Meskipun secara teoritis produk pertanian, kehutanan, dan perikanan akan meningkat nilainya dan menjadi kompetitif jika ditempatkan pada pasar persaingan sempurna yang terdapat tanda-tanda interaksi antara kekuatan penawaran dan permintaan pada keseimbangan (harga keseimbangan dan kuantitas keseimbangan).). dimana seluruh barang yang dihasilkan oleh perekonomian harus dapat diserap oleh masyarakat, namun dalam realitas kehidupan sehari-hari, kondisi tersebut tidak pernah terpenuhi sepenuhnya apabila supply dan demand selalu berada pada keadaan yang tidak seimbang. Hal ini juga berlaku pada perkebunan kelapa sawit yang ada di unit Marihat. Meskipun kelapa sawit menduduki peringkat pertama di antara tanaman pangan di unit Marihat, memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, interaksi antara pasokan TBS (supply), terutama pasokan TBS dari petani swadaya dan permintaan (demand) TBS dari pabrik pengolahan kelapa sawit. tidak pernah sama, sering terjadi kelebihan pasokan. TBS dari pemilik kecil swadaya, selain kualitas TBS yang dihasilkan pekebun swadaya, dinilai belum memenuhi standar yang ditetapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Kondisi lain seperti yang diteliti oleh Nesti dkk. (2018) berpendapat bahwa pemasaran kelapa sawit di unit Marihat tidak efektif karena harga beli yang diterima produsen kelapa sawit rendah, tidak lengkap dan eksklusif.

Rata-rata pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) di Sumatera Barat semuanya mempunyai perkebunan sendiri (perkebunan sentral), sehingga pabrik PKS akan memprioritaskan pasokan TBS ke tanaman mereka sendiri (hingga 80%) dan sisanya berasal dari pemilik kecil di Plasma (15%) dan pemilik kecil mandiri (5%), sehingga TBS dari pemilik kecil mandiri hanya satu.

hanya ditambahkan apabila TBS dari perkebunan Inti dan Plasma tidak mencukupi pasokan TBS bagi tanaman. Sementara itu, tingginya permintaan global terhadap CPO Indonesia ditandai dengan tingginya harga jual CPO di luar negeri setelah naiknya harga minyak mentah di pasar internasional, sehingga tingginya harga CPO di luar negeri ini selalu diapresiasi oleh eksportir Indonesia setiap tahunnya. Hal ini wajar Kenaikan harga CPO di luar negeri

juga berdampak pada harga TBS yang dimiliki oleh pengusaha kecil mandiri.

Kebijakan pemerintah untuk mengatur rantai pasok minyak sawit sangat penting untuk mendorong pertanian dan menjadikan industri lebih produktif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Dabukke dan Iqbal (2014) berpendapat bahwa kebijakan merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan daya saing produk pertanian suatu negara. Intervensi kebijakan yang efektif dan efisien memerlukan pengetahuan rinci mengenai penawaran dan permintaan serta dampak dan biaya (Basiron, 2002). Kebijakan pemerintah di bidang pertanian dan hortikultura meliputi kebijakan penyediaan bahan baku untuk kebutuhan industri, kebijakan harga dalam negeri, dan kebijakan pengaturan volume ekspor.

Khusus produk minyak sawit, beberapa penelitian telah banyak dibahas, antara lain:

studi yang dilakukan oleh (Bisuk, 2009) tentang elastisitas transmisi harga internasional dari harga CPO ke harga TBS di Kab. Padang Lawas, (Azwar, 2015) tentang dampak perubahan harga minyak sawit mentah (CPO) dunia terhadap volume ekspor produk minyak sawit dan perekonomian Indonesia, (Hariyanto, 2008) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi harga minyak sawit domestik (CPO) di Indonesia pada tahun 1980-2007 . Selain kajian harga produk kelapa sawit, juga terdapat kajian rantai pasok kelapa sawit yang dilakukan oleh (Jakfar et al., 2015); (Jelsma dkk., 2017); (Hidayat dkk., 2014). Namun hanya sedikit yang membahas kebijakan pemerintah terkait kelapa sawit, seperti penelitian (Turnip et al., 2016); (Arfah, 2016); (Munadi, 2007) tentang pengurangan pajak ekspor dan dampaknya terhadap ekspor minyak sawit india ke India. Penelitian lebih lanjut juga dilakukan oleh Arfah, 2016; Syahuti dkk., 2014; iqbal,2013 yang secara jelas menyatakan bahwa harus ada tanggung jawab bersama terhadap kebijakan pangan, semangat nasional dan kebijakan yang bermanfaat bagi petani dan produksi nasional. Beberapa penelitian seperti Iqbal, 2013; Artinya, 2011; Munadi,2007; Dabukke dan Iqbal, 2014 menganalisis sejumlah kebijakan pemerintah yang berdampak pada industri kelapa sawit Indonesia, khususnya terkait pajak ekspor. Selain itu, penelitian Nesti dkk. (2018) mengaku memiliki agen terkait di pada rantai pasok kelapa sawit yang mempunyai kekuatan dominan dalam mempengaruhi harga jual TBS untuk mampu mengatur harga jual TBS produsen sehingga menyebabkan terjadinya inefisiensi pada pasar yang terintegrasi secara vertikal.

Sejumlah kebijakan pemerintah terkait penyediaan bahan baku diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/05/06 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK/12/06 tentang Program Pemulihan Perkebunan, namun pemanfaatannya belum maksimal. Selain itu, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.

21/Permentan/Kb.410/6/2017 Mengenai pedoman perizinan bagi perusahaan peternakan, yang mengatur bahwa perusahaan pengolahan hasil tanaman paling sedikit harus memenuhi:20% dari total kebutuhan bahan baku berasal dari perkebunan pusat, sedangkan kekurangannya harus disuplai oleh perkebunan milik.

masyarakat melalui kemitraan transformatif bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, menetapkan harga pasar yang wajar dan mencapai peningkatan nilai tambah yang berkelanjutan bagi petani kecil. Namun kenyataannya banyak pabrik PKS yang tidak memiliki lahan sendiri dan tidak berafiliasi dengan petani.

Kebijakan harga dalam negeri terhadap produk TBS kelapa sawit sesuai peraturan Kementerian Pertanian. :14/permanen/PL. 140/2/2013 Tentang pembinaan petani dalam menentukan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit, kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga TBS milik petani. Khusus di unit Marihat, sejumlah aturan yang dikeluarkan:

Keputusan Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Tandan Buah Segar Hasil Produksi Kelapa Sawit Oleh Petani Di Unit Marihat, Namun Dalam Prakteknya Hal Ini Belum Berjalan Sesuai Harapan, Harga Di Tingkat Petani Masih Jauh Dari Standar Harga Yang Berlaku, Maka Kebijakan Ini masih dianggap tidak efektif.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis harga realisasi penjualan TBS ditingkat pengumpul, harga realisasi penjualan ekspor Crude Palm Oil (CPO), realisasi harga penjualan kernel dan kebijakan pemerintah terhadap harga realisasi penjualan TBS ditingkat petani swadaya beserta usaha yang semestinya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya tawar petani swadaya kelapa sawit di Unit Marihat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini selain menggunakan kajian deskriptive kuantitatif, juga menggunakan model regresi ECM (Error Correction Model) dalam menganalisis pengaruh kebijakan pemerintah

terhadap komoditi kelapa sawit di Unit Marihat. Populasi penelitian ini adalah pelaku rantai pasok kelapa sawit di unit marihat yang terdiri dari petani sawit swadaya, pengumpul kecil, pengumpul besar, industri pengolah kelapa sawit dan eksporter. Pengambilan sampel ditetapkan secara purposif sebanyak 150 orang responden petani sawit swadaya di Unit Marihat dengan rincian :

pengumpul kecil ditetapkan sebanyak 30 orang responden, untuk pengumpul besar ditetapkan 15 responden, sedangkan untuk eksporter sekaligus pemilik pabrik pengolahan kelapa sawit diambil sampel berjumlah masing- masing 5 perusahaan, adapun penetapan teknik sampling secara purposive ini didasari oleh pertimbangan peneliti dalam menentukan responden yang akan diambil melihat dari scope pekerjaan yang mereka lakukan saat ini

yakni sebagai pelaku di sektor perkebunan kelapa sawit di Unit Marihat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan sampel beberapa PKS produsen, pengepul dan pabrik kelapa sawit yang berada di tiga wilayah. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Data sekunder dikumpulkan melalui pihak/instansi terkait yaitu Departemen Tanaman Pangan, Unit Budidaya Marihat dan Hortikultura, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan BPS, Pelindo, perwakilan Bank Indonesia serta melalui telaah dokumen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa data bulanan tahun 2020 sampai dengan Maret 2023 dari empat variabel independen yaitu realisasi harga TBS di tingkat pengumpulan, realisasi harga CPO di tingkat ekspor (FOB) dan ekspor nuklir dalam negeri. (FOB) dan harga lokal dengan menggunakan kebijakan pemerintah sebagai variabel dummy, variabel responnya adalah harga jual TBS aktual pada tingkat rumah tangga kecil mandiri.

Metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Uji hipotesis klasik

Pengujian hipotesis klasik digunakan untuk melihat apakah model yang digunakan multikolinear, mempunyai varian yang sama (uji variance), apakah terdapat korelasi antar komponen pengamatan (uji autokorelasi) dan apakah residual berdistribusi normal (uji normalitas) dan sudah linier (linier). tes).

Pengujian Stasioner Data dan Uji Kointegrasi

Pengujian stasioner data dan uji kointegrasi yang mencakup :

a. Analisis stasioner data dengan uji akar unit dengan model ADF (*Augmented Dickey Fuller*). Jika hasil dari uji stasioner tersebut :

Stasioner : maka dapat langsung dilakukan analisis terhadap model estimasi yang dibentuk
Jika tidak stasioner maka dilakukan diferensiasi sampai data stasioner untuk kemudian dilakukan analisis bentuk diferensiasi terhadap model estimasi yang dibentuk.

b. Apabila pada uji akar unit data deret waktu tersebut belum stasioner maka langkah berikutnya adalah melakukan uji derajat integrasi untuk mengetahui pada derajat integrasi ke berapa data akan stasioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum mengestimasi ECM dilakukan uji hipotesis klasik yang meliputi uji multikolinearitas

data, uji varian variabel, uji autokorelasi, uji normalitas, dan uji linearitas.

Uji hipotesis klasik

Tes ini memberi tahu Anda jika ada apakah menyimpang atau tidak dari asumsi yang lazim, antara lain:

uji multikolinearitas, uji varian, uji normalitas, dan uji autokorelasi. Proses pengolahan data menggunakan program Eviews dan hasilnya menunjukkan bahwa pada uji multikolinearitas, koefisien korelasi parsial antar variabel independen relatif rendah yaitu kurang dari 0,8. Angka tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas antar variabel independen. Pada uji Breusch-Pagan-Godfrey diperoleh nilai Obs*R squared sebesar 7.749412 lebih besar dari $\alpha=5\%$ yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mempunyai masalah varians variabel.

Hasil pengujian autokorelasi diperoleh nilai probabilitas Chisquare sebesar 0,1680 > taraf nyata 5% maka disimpulkan bahwa model dikatakan tidak mengandung autokorelasi. Uji normalitas memperlihatkan data telah berdistribusi normal dan uji linieritas memperlihatkan nilai F statistiknya sebesar 0,6704 lebih besar dari taraf nyata berarti dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan sudah tepat mempresentasikan pengaruh harga TBS realisasi penjualan ditingkat Pengumpul, harga CPO realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal, harga kernel realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal terhadap harga TBS realisasi penjualan ditingkat Petani Swadaya di unit mariat.

Pengujian Stasioneritas, Uji Derajat Integrasi Dan Uji Kointegrasi

Setelah melakukan pengujian asumsi klasik, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap masing- masing variabel pembentuk model, yakni uji stasioneritas data, uji derajat intergrasi dan uji kointegrasi.

Uji Akar Unit (Unit Root Test) dan Uji Derajat Integrasi, Pengujian akar unit dimulai pada tingkat level, ternyata pada variabel harga jual kernel dan harga jual tingkat petani swadaya ($Prob > 0,05$) tidak stasioner sehingga diulangi pengujian stasioner untuk diferensiasi pertama.

Dari pengujian akar unit dengan metode Augmented Dickey Fuller 1st Difference, semua variabel sudah stasioner pada taraf nyata 5% sehingga dinyatakan bahwa data stasioner pada differensiasi pertama dan pengujian dilanjutkan dengan uji Kointegrasi (Tabel 1). Tes kointegrasi

Hasil uji kointegrasi diperoleh dengan membentuk residu yang diperoleh dengan melakukan regresi variabel independen terhadap variabel dependen dalam OLS dengan ketentuan residu tersebut harus berhenti pada tingkat yang dikatakan terkointegrasi.

Hasil regresi OLS untuk menghasilkan residu disajikan pada Tabel 2. Dari persamaan regresi tersebut, residu tersebut diekstraksi dan diberi nama ECT (Error Correction Term), kemudian unit root diuji dengan metode Augmented Dickey Fuller dalam derajat, residu harus stasioner pada derajat yang seharusnya memiliki kointegrasi.

GRAFIK PENJUALAN TAHUN 2020-2023

JUMLAH TOTAL PRODUKSI	Luas Areal Produktif	Uraian	Tahun	Januari	Februari	Maret
				(Kg)	(Kg)	(Kg)
JUMLAH PRODUKSI 2020	755,96	Taksasi (Kg)	2020	1.515.781	1.456.940	1.461.566
		Realisasi (Kg)		983.298	961.048	1.008.474
		+/- (Kg)		(532.483)	(495.892)	(453.092)
		Sampai Dengan (Kg)		(532.483)	(1.028.375)	(1.481.467)
JUMLAH PRODUKSI 2021	755,96	Taksasi (Kg)	2021	1.060.770	956.348	1.162.327
		Realisasi (Kg)		950.138	832.929	978.652

		+/- (Kg)		(110.632)	(123.419)	(183.675)
		Sampai Dengan (Kg)		(110.632)	(234.051)	(417.726)
JUMLAH PRODUKSI 2022	755,96	Taksasi (Kg)	2022	923.131	907.445	1.030.008
		Realisasi (Kg)		1.088.194	999.523	1.032.976
		+/- (Kg)		165.063	92.078	2.968
		Sampai Dengan (Kg)		165.063	257.141	260.109
JUMLAH PRODUKSI 2023	835,94	Taksasi (Kg)	2023	1.148.451	1.143.738	1.161.272
		Realisasi (Kg)		1.048.845	842.601	776.901
		+/- (Kg)		(99.606)	(301.137)	(384.371)
		Sampai Dengan (Kg)		(99.606)	(400.743)	(785.114)

Tabel 1. Uji akar unit masing-masing variabel model

Variabel	Uji Akar Unit			
	Level		1 st Difference	
	ADF	Prob	ADF	Prob

Log(Pa)	-3,80	0,0041	-11,76	0,0001
Log(Pe)	-3,13	0,0278	-9,97	0,0000
Log(Pk)	-2,35	0,1581	-8,74	0,0000
Log(Pp)	-2,37	0,1520	-8,09	0,0000

Sumber : Data diolah sendiri

Keterangan : Pp = Harga TBS realisasi penjualan ditingkat Petani Swadaya (Rp/Kg), Pa = Harga TBS realisasi penjualan tingkat Agen/Pengumpul (Rp/Kg), Pe = Harga CPO realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal (Rp/Kg) Pk = Harga Kernel realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal (Rp/Kg)

Tabel 2. Regresi OLS untuk membentuk residual

Dependent Variable: Log(Pp)				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,502135	0,142680	-3,519315	0,0007
Log(Pe)	0,557426	0,065259	8,541796	0,0000
Log(Pa)	0,288554	0,054524	5,292272	0,0000
Log(Pk)	0,158987	0,019351	8,215769	0,0000
R-squared	0,949122	Mean dependent var		3,170926
F-statistic	534,7780	Durbin-Watson stat		1,665979
Prob(F-statistic)	0,000000			

Sumber : Data diolah sendiri

Tabel 3. Pengujian akar unit ECT pada tingkat level

Null Hypothesis: ECT has a unit root				
			t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic			-9,105131	0,0000
Test critical values:	1% level		-3,507394	
	5% level		-2,895109	
	10% level		-2,584738	
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ECT(-1)	-0,988284	0,108541	-9,105131	0,0000
C	6,02E-05	0,003157	0,019075	0,9848
R-squared	0,493757	Mean dependent var		0,000194
F-statistic	82,90340	Durbin-Watson stat		1,965353
Prob(F-statistic)	0,000000			

Sumber : Data diolah sendiri

Dari hasil pengujian akar unit untuk ECT didapat bahwa residual stasioner pada tingkat level yang dinyatakan oleh nilai Prob < 5% (Prob 0,0000), dengan demikian dapat dinyatakan bahwa data tersebut terkointegrasi. Jika telah dibuktikan bahwa ECT telah stasioner pada tingkat level, dengan demikian pembentukan persamaan regresi dinamis ECM dapat dilanjutkan.

Model Regresi ECM

Sebelum mengestimasi ECM dilakukan uji hipotesis klasik yang meliputi uji multikolinearitas data, uji varian variabel, uji autokorelasi, uji normalitas, dan uji linearitas.

Uji hipotesis klasik

Tes ini memberi tahu Anda jika adaapakah menyimpang atau tidak dari asumsi yang lazim, antara lain: uji multikolinearitas, uji varian, uji normalitas, dan uji autokorelasi. Proses pengolahan data menggunakan program Eviews dan hasilnya menunjukkan bahwa pada uji multikolinearitas,

koefisien korelasi parsial antar variabel independen relatif rendah yaitu kurang dari 0,8. Angka tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinearitas antar variabel independen. Pada uji Breusch-Pagan-Godfrey diperoleh nilai Obs*R squared sebesar 7.749412 lebih besar dari $\alpha=5\%$ yang menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mempunyai masalah varians variabel.

Hasil pengujian autokorelasi diperoleh nilai probabilitas Chisquare sebesar 0,1680 > taraf nyata 5% maka disimpulkan bahwa model dikatakan tidak mengandung autokorelasi. Uji normalitas memperlihatkan data telah berdistribusi normal dan uji linieritas memperlihatkan nilai F statistiknya sebesar 0,6704 lebih besar dari taraf nyata berarti dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan sudah tepat mempresentasikan pengaruh harga TBS realisasi penjualan ditingkat Pengumpul, harga CPO realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal, harga kernel realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal terhadap harga TBS realisasi penjualan ditingkat Petani Swadaya di unit mariat.

Pengujian Stasioneritas, Uji Derajat Integrasi Dan Uji Kointegrasi Setelah melakukan pengujian asumsi klasik, selanjutnya dilakukan pengujian terhadap masing-masing variabel pembentuk model, yakni uji stasioneritas data, uji derajat intergrasi dan uji kointegrasi. Uji Akar Unit (Unit Root Test) dan Uji Derajat Integrasi Pengujian akar unit dimulai pada tingkat level, ternyata pada variabel harga jual kernel dan harga jual tingkat petani swadaya ($Prob > 0,05$) tidak stasioner sehingga diulangi pengujian stasioner untuk diferensiasi pertama.

Dari pengujian akar unit dengan metode Augmented Dickey Fuller 1st Difference, semua variabel sudah stasioner pada taraf nyata 5% sehingga dinyatakan bahwa data stasioner pada differensiasi pertama dan pengujian dilanjutkan dengan uji Kointegrasi (Tabel 1). Tes kointegrasi

Hasil uji kointegrasi diperoleh dengan membentuk residu yang diperoleh dengan melakukan regresi variabel independen terhadap variabel dependen dalam OLS dengan ketentuan residu tersebut harus berhenti pada tingkat yang dikatakan terkointegrasi.

Hasil regresi OLS untuk menghasilkan residu disajikan pada Tabel 2. Dari persamaan regresi tersebut, residu tersebut diekstraksi dan diberi nama ECT (Error Correction Term), kemudian unit root diuji dengan metode Augmented Dickey Fuller dalam derajat, residu harus stasioner pada derajat yang seharusnya memiliki kointegrasi. Hasil uji unit root pada level ECT dapat dilihat pada Tabel 3. ternyata tidak berdampak pada harga jual TBS petani swadaya, masih tetap berada dibawah harga yang telah ditetapkan pemerintah sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan petani swadaya saat ini.

Jika dikaitkan dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14 /permentan / OT. 140/2/2013 Tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi Pekebun yang mulai diberlakukan sejak tahun 2018 tersebut, seharusnya berdampak langsung terhadap harga jual TBS petani swadaya, namun kondisinya tidak demikian, hanya berdampak kepada harga jual TBS petani plasma saja, Sehingga kebijakan pemerintah tersebut dinilai belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit di unit marihat.

Kondisi Petani Swadaya Di Unit Marihat

Harga yang diterima oleh petani swadaya di Unit Marihat dalam penjualan TBS nya ke pengumpul berdasarkan patokan harga yang ditetapkan oleh pengumpul. Petani tidak dapat melakukan tawar menawar dengan pengumpul, harga yang ditetapkan pengumpul harus diterima oleh petani. Sementara itu pengumpul mendapatkan informasi harga beli TBS ditingkat pabrik melalui informasi yang diumumkan oleh pabrik yang dikenal dengan harga kaca. Disini pengumpul membeli TBS petani swadaya lebih rendah daripada harga beli TBS ditingkat pabrik untuk mendapatkan keuntungan.

Pada Gambar 2 merupakan data hasil survey harga beli TBS Petani Swadaya pada tahun 2020-2023, memperlihatkan fluktuasi, meskipun terdapatnya peningkatan harga beli TBS namun peningkatannya tidak signifikan, dan berada pada kisaran rata-rata Rp 1300,-/ Kg. Jika dibandingkan dengan harga beli TBS petani plasma yang berada pada kisaran rata-rata Rp 1700/Kg, maka harga harga beli TBS petani swadaya di Unit Marihat berada jauh dibawah harga beli TBS petani plasma. Kondisi inilah yang menyebabkan tingkat kesejahteraan petani swadaya masih jauh dibawah tingkat kesejahteraan petani plasma. Jika ditelusuri yang menjadi penyebabnya karena rendahnya daya tawar TBS petani swadaya.

Tabel 4 . Koefisien regresi ECM pada harga TBS dan CPO di unit marihat dengan memasukkan kebijakan pemerintah

Dependent Variable: D(Log(Pp))					
	Variable	Coefficient	Std.		
Error	t-Statistic	Prob.			
<i>Sumber : Data diolah sendiri</i>					
		0,000681	0,001665	0,408975	0,6836
		0,174881	0,036226	4,827548	0,0000
		0,356261	0,067789	5,255475	0,0000
		0,217073	0,040669	5,337516	0,0000
		-0,017677	0,015647	-1,129794	0,2619
	ECT(-1)	-0,413968	0,107484	-3,851432	
1	0,737387	Mean dependent var			0,001615
1	0,721374	S.D. dependent var			0,029382
1	46,04926	Durbin-Watson stat			2,135713
1	0,000000				

Hal ini menunjukkan perbandingan antar *supply* TBS dari kebun milik swasta, kebun milik pemerintah dan kebun milik petani (kebun rakyat) dengan *demand* TBS dari pabrik PKS memperlihatkan adanya kelebihan pasokan TBS (*over supply*). Sehingga dengan adanya *over supply* dari TBS petani swadaya menjadi alasan utama banyaknya TBS petani swadaya ditolak pabrik, disamping mutu TBS dari petani swadaya rata-rata masih berada dibawah standar pabrik. Kondisi ini rata-rata terjadi hampir disemua daerah di unit marihat.

Selanjutnya jika dilihat dari penetapan harga pembelian TBS yang dilakukan oleh tim perumusan harga yang difasilitasi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan unit marihat terhadap perusahaan yang bermitra dengan KUD Plasma pada wilayah yang telah ditentukan yang dilakukan setiap 2 minggu. Terlihat bahwa penentuan harga TBS sangat dipengaruhi oleh harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) disamping juga dipengaruhi oleh harga rata-rata CPO tertimbangrealisasi penjualan lokal masing-masing perusahaan, seperti diuraikan sebelumnya bahwa perusahaan yang melakukan ekspor CPO di Unit Marihat merupakan 10 diantara 13 perusahaan ekspor tergabung dalam Grup Incasi Raya, sehingga dengan sendirinya harga realisasi penjuln ekspor CPO perusahaan eksportir yang

tergabung dalam Grup Incasi Raya ini sangat dominan dalam penentu harga CPO realisasi penjualan ekspor dan juga harga jual TBS petani.

Oleh sebab itu, diperlukan monitoring oleh pemerintah terhadap kebijakan terkait penetapan harga TBS di Unit Marihat saat ini terutama penetapan harga TBS oleh pihak pabrik yang dilakukan secara sepihak terhadap TBS petani swadaya. Jika kondisi ini terus berlangsung, akan melemahkan gairah petani swadaya untuk memproduksi TBS dimasa yang akan datang. Proses monitoring dan evaluasi kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya tawar petani kelapa sawit swadaya di unit marihat saat ini.

Disamping itu diperlukan beberapa kebijakandan strategi kedepan yang tepat, seperti jaminan keamanan, penyediaan sumber dana yang memadai serta kejelasan tata niaga TBS dan CPO.

Salah satu kebijakan jangka pendek yang dinilai perlu penanganan segera adalah penetapan harga terendah TBS petani swadaya yang adil (*fair price*) oleh Pemerintah, untuk jangka menengah berupa pendampingan dan penguatan SDM petani swadaya, sedangkan kebijakan jangka panjang berupa peningkatan produktivitas lahan petani swadaya dengan cara pembentukan koperasi kelompok tani swadaya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kondisi saat ini dimana pasokan TBS petani Terlepas dari permintaan TBS dari pabrik pengolahan minyak sawit Marihat, pasokan TBS selalu mengalami kelebihan pasokan. Oleh karena itu, PKS dapat menurunkan harga jual TBS yang dilakukan petani swadaya. Dengan menggunakan model koreksi kesalahan (ECM), ditentukan bahwa harga pelaksanaan TBS di tingkat pengepul, harga pelaksanaan CPO untuk penjualan ekspor dan dalam negeri, serta harga inti yang dilaksanakan untuk penjualan ekspor dan domestik, terbukti mengalami benturan. Penetapan harga TBS berdampak signifikan terhadap penjualan di tingkat petani swadaya, namun kebijakan pemerintah mengenai penetapan harga TBS tidak berdampak signifikan terhadap harga jual aktual di tingkat rumah tangga. Perlunya pemantauan dan evaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan di masa lalu dan perlunya kebijakan dan strategi yang lebih tepat di masa depan. Kebijakan jangka pendek yang sebaiknya segera dilaksanakan adalah penetapan harga terendah pangan petani swadaya yang wajar (*reasonable price*) oleh pemerintah, dalam jangka menengah berupa dukungan finansial. membangun sumber daya manusia. kebijakan pekebun swadaya, sedangkan kebijakan jangka panjang berupa peningkatan produktivitas lahan pekebun swadaya dengan membentuk koperasi produsen swadaya. kelompok tani

Saran

Pada penelitian yang akan datang perlu dikaji lebih dalam lagi tentang kebijakan terkait pembentukan koperasi kelompok tani swadaya kelapa sawit agar dapat memenuhi permintaan sesuai dengan persyaratan pabrik sehingga tidak terjadi *over supply* TBS beserta teknis pembentukan koperasi yang dapat bersaing dengan koperasi plasma dan perlu juga mengkaji tentang menetapkan persyaratan untuk mendirikan pabrik kelapa sawit yang dapat meningkatkan daya tawar petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfah SYC. 2016. Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap daya saing komoditas kakao di Sulawesi Tengah. [Thesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Arti DB. 2011. Analisis strategi kebijakan pemerintah terkait dengan perkembangan industri kelapa sawit nasional. [Thesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Azwar. 2015. Dampak perubahan harga crude palm oil (CPO) dunia terhadap volume ekspor komoditas kelapa sawit dan perekonomian Indonesia (pendekatan vector autoregression analysis). *Jurnal Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)*. 1(13): 1-20
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. 2017. Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka
- Basiron Y. 2002. Palm oil and its global supply and demand prospects. *Oil Palm Industry Economic Journal*, 2(1): 1-10.
- Bisuk P. 2009. Analisis tata niaga dan elastisitas transmisi harga CPO internasional terhadap harga TBS kelapa sawit (studi kasus Desa Mananti Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas). [Skripsi]. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Dabukke FBM dan Iqbal M. 2014. Kebijakan pembangunan pertanian Thailand, India, dan Jepang serta implikasinya bagi Indonesia. *IAARD E-Journal*, 12, 87-101. <http://ejurnal.litbang.pertanian.go.id/index.php/akp/article/download/3859/3206>
- Darbandi E. 2018. Price transmission analysis for Nicaragua rice market. *International Journal Of Food And Agricultural Economics Price Transmission Analysis For Nicaragua Rice Market University of Kentucky, Dept. of Agricultural Economics Price Transmission Analysis for Nicaragua*, 6(1): 85-94.
- Hariyanto. 2008. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga domestik minyak sawit (CPO) di Indonesia tahun 1980-2007. [Skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor
- Hidayat S, Nurhasanah N, dan Prasongko RA. 2014. Formulasi nilai tambah pada rantai pasok minyak sawit. *Optimasi Sistem Industri*, 13(1), 576-587.

- Saptana, Iqbal M, dan Makky A. 2013. Evaluation of seven revitalization policies in agricultural development. *Jurnal Litbang Pertanian*.11(2): 107–127.
- Jakfar F, Nurcholis N, dan Romano R. 2015. Pengelolaan rantai pasok dan daya saing kelapa sawit di Aceh. *Journal of Agribusiness and Rural Development Research*. 1(2), 108–113.
- Jelsma I, Schoneveld GC, Zoomers A, Westen ACM. 2017. Land use policy unpacking Indonesia's independent oil palm smallholders: An actor- disaggregated approach to identifying environmental and social performance challenges. *Land Use Policy*, 69 (July): 281–297. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.0>